

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI PUSAT PENGELOLAAN
KOMPLEK KEMAYORAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi bidang keuangan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang paling menonjol adalah pergeseran dari penganggaran tradisional ke penganggaran berbasis kinerja. Penggunaan dana pemerintah berpindah dari sekedar membiayai masukan (*input*) ke pembayaran terhadap keluaran (*output*). Sejalan dengan itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, khususnya Pasal 68 dan Pasal 69, membukapintu bagi penerapan basis kinerja instansi pemerintah yang tugas pokoknya memberi pelayanan kepadamasyarakat untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Instansi demikian disebut sebagai Badan Layanan Umum (BLU). Terhadap BLU diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini merupakan salah satu alternatif untuk mendorong peningkatan pelayanan publik dengan mewiraswastakan pemerintah. Untuk itu kepada BLU juga diberi kesempatan untuk mempekerjakan tenaga profesional non PNS dengan pemberian imbalan jasa kepada pegawai sesuai dengan kontribusinya. Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPK Kemayoran) telah mendapat persetujuan untuk menjalankan pola pengelolaan keuangan BLU dari Menteri Keuangan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 390/KMK.05/2011 tentang Penetapan Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran Jakarta pada Kementerian Sekretariat Negara Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU, setiap BLU harus menerapkan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Indonesia sesuai dengan jenis industrinya. Sebagai salah satu upaya untuk melaksanakan ketentuan tersebut PPK Kemayoran menyusun Sistem Akuntansi ini.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Sistem Akuntansi disusun agar dapat dijadikan pedoman bagi PPK Kemayoran dalam menyusun laporan keuangan secara transparan dan akuntabel serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Tujuan

Sistem Akuntansi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan kesamaan persepsi bagi Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penerbit SPM, Penanggungjawab Kegiatan, Atasan Langsung Bendahara, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Penyusun Laporan Keuangan serta Pengelola Anggaran lainnya tentang tata kelola keuangan yang berlaku di PPK Kemayoran.

Untuk itu penerapannya agar dapat menyajikan:

- a. informasi tentang posisi keuangan secara akurat dan tepat waktu dalam bentuk Neraca;
- b. informasi tentang kemampuan untuk memperoleh sumber daya ekonomi berikut beban selama suatu periode dalam bentuk Laporan Aktivitas;
- c. informasi tentang sumber dan penggunaan dana dalam bentuk Laporan Arus Kas; dan
- d. informasi tentang pelaksanaan anggaran secara akurat dan tepat waktu.

C. Ruang Lingkup

Laporan Keuangan PPK Kemayoran disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntansi Indonesia/Standar Akuntansi Industri Spesifik dan juga harus sejalan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Laporan Keuangan SAK digunakan untuk kepentingan pelaporan kepada pengguna umum, dalam hal ini adalah *stakeholders*, yaitu pihak-pihak yang berhubungan dan memiliki kepentingan dengan PPK Kemayoran. Sedangkan Laporan Keuangan SAP digunakan untuk kepentingan konsolidasi Laporan Keuangan PPK Kemayoran ke dalam Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara.

Sistem Akuntansi PPK Kemayoran merupakan bagian dari sistem informasi keuangan secara keseluruhan, sehingga tidak dapat dipisahkan dari sistem informasi manajemen yang ada di PPK Kemayoran. Sistem Akuntansi PPK Kemayoran terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan dan Sistem Akuntansi Aset Tetap.

D. Pengertian

Berikut ini beberapa istilah yang digunakan dengan pengertian:

1. **Badan Layanan Umum**, yang selanjutnya disebut **BLU**, adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan kepentingan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
2. **Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran**, yang selanjutnya disebut **PPK Kemayoran** adalah instansi Pemerintah pada Kementerian Sekretariat Negara yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLU dengan status BLU secara Penuh.
3. **Sistem Akuntansi** adalah serangkaian prosedur baik manual maupun terkomputerisasi mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasional keuangan.
4. **Sistem Akuntansi Keuangan** adalah sistem akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan pokok untuk tujuan umum.
5. **Sistem Akuntansi Aset Tetap** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh PPK Kemayoran sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan mempunyai manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan, diharapkan dapat diperoleh serta dapat diukur dalam satuan uang, dan sumber-sumber daya yang terpelihara karena alasan sejarah dan budaya.

BAB II SISTEM AKUNTANSI

A. Kerangka Konseptual

1. Dasar Akuntansi

Penetapan standar akuntansi dikembangkan didasarkan pada standar akuntansi yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntansi Indonesia yang disesuaikan dengan jenis industrinya. Dalam hal ini disesuaikan dengan tugas pokok PPK Kemayoran sebagai pengelola kawasan tertentu yang didasarkan pada Hak Pengelolaan Lahan pada Kawasan Kemayoran.

Penerapan Sistem Akuntansi yang dikembangkan diarahkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang mampu menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja serta perubahan posisi keuangan yang bermanfaat bagi pengguna laporan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan ekonomi.

Pelaporan sistem akuntansi keuangan diharapkan dapat memenuhi 3 (tiga) aspek, sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas; mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;
- b. Manajemen; membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh penerimaan, pengeluaran, aset, kewajiban, dan ekuitas untuk kepentingan *stakeholders*;
- c. Transparansi; memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan PPK Kemayoran disusun berdasarkan basis akrual, kecuali laporan kas. Berdasarkan hal ini, pengaruh transaksi diakui pada saat kejadian (bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pengguna tidak hanya transaksi penerimaan dan pembayaran kas masa lalu tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya kas yang akan diterima di masa depan. Laporan keuangan disusun atas dasar asumsi bahwa PPK Kemayoran akan melanjutkan usahanya secara

berkelanjutan. Karena itu, diasumsikan bahwa PPK Kemayoran tidak bermaksud untuk mengurangi secara material skala usahanya.

Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, perubahan ekuitas, dan arus kas dengan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) secara benar disertai pengungkapan yang diharuskan dalam catatan atas laporan keuangan. Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten kecuali terjadi perubahan yang signifikan terhadap operasi PPK Kemayoran atau perubahan penyajian akan menghasilkan penyajian yang lebih tepat atas suatu transaksi atau peristiwa, yang perubahan tersebut diperkenankan oleh PSAK. Perubahan tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Karakteristik Laporan Keuangan

Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok, yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan.

a. Dapat dipahami

Kualitas laporan keuangan yang penting adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan. Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar.

b. Relevan

Informasi laporan keuangan harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu.

c. Andal

Informasi laporan keuangan memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan penggunaannya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

d. Dapat dibandingkan

Pengguna dapat memperbandingkan laporan keuangan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga dapat membandingkan laporan keuangan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian